

## ANALISIS HUBUNGAN IPM, KAPASITAS FISKAL, DAN KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS 38 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2008 DAN 2010)

Purwiyanti Septina Franciari, FX. Sugiyanto<sup>1</sup>

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Sudarto, SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*Poverty remains the biggest problem for Indonesia. Therefore, it is necessary to find solutions to overcome, or at least to reduce the level of poverty in Indonesia. This study aimed to analyze the effect of HDI, economic capacity, and corruption on poverty in Indonesia.*

*The method used in this study are OLS (Ordinary Least Square) and granger causality test using secondary data types. Research samples are 38 regencies/cities in Indonesia in 2008 and 2010.*

*The results of this study show that in 2008 HDI, fiscal capacity, and corruption have negative effect that not significant at  $\alpha = 5$  percent and  $\alpha = 10$  percent against poverty. In 2010, the fiscal capacity has negative effect that significant at  $\alpha = 10$  percent against poverty, while HDI and corruption have negative effect that not significant. Based on the results of granger causality, there are differences in behavior patterns between 2008 and 2010.*

*Keywords: Poverty, HDI, Fiscal Capacity, Corruption*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan terbesar bagi Bangsa Indonesia. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dari APBN dan volume utang untuk pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tetapi jumlah penduduk miskin sendiri masih sulit diturunkan. Kemiskinan yang terjadi bisa dilihat dari kurang terpenuhinya kesejahteraan orang tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM dan kapasitas fiskal akan mendorong terjadinya kemiskinan.

Try Haryono menyebutkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Korupsi menyebabkan anggaran yang sedianya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja menguap ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan kondisi penduduk makin terpuruk (Korupsi yang Memiskinkan, Maria Hartiningsih (Ed), 2011). Tingginya tingkat korupsi di Indonesia dianggap sebagai penyebab masih banyaknya jumlah penduduk miskin. Walaupun belum ada kajian literatur yang membuktikan hubungan langsung antara korupsi dan kemiskinan, tetapi kenyataannya korupsi menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia serta menganalisis perbedaan perilaku IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan pada tahun 2008 dan 2010.

### KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### Kemiskinan

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. BPS menyebutkan ada 14 kriteria suatu keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang,

---

<sup>1</sup> Penulis Penanggung Jawab

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan,
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester,
4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain,
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan,
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah,
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu,
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu kali/dua kali dalam sehari,
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik,
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup> – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan (2005) – atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per kapita per bulan (2007),
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD,
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Untuk mengindikasikan kemiskinan digunakan garis kemiskinan yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang melampaui ukuran garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah ukuran yang didasarkan pada kebutuhan konsumsi minimum, baik konsumsi makanan, pakaian, maupun perumahan. Batas kemiskinan menurut BPS didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2.100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non-makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat, dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai skill yang selanjutnya membuat produktivitasnya meningkat dan pendapatan meningkat. Produktivitas yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak pro-kemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak dipedulikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang.

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) menjelaskan bahwa korupsi dapat memperburuk kemiskinan. Tingginya korupsi di suatu daerah menyebabkan para investor enggan untuk berinvestasi di daerah tersebut. Rendahnya investasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah terhambat serta dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini menyebabkan kondisi kemiskinan daerah tersebut akan semakin buruk.

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM mencakup tiga komponen dasar yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, yaitu peluang hidup (*longevity*) yang dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan standar hidup layak (*living standards*) yang diukur dengan pengeluaran per kapita berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dapat menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian menyebabkan tingkat kemiskinan berkurang.

Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan – akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk – mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi (Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 1999).

### Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam penelitian ini kapasitas fiskal diukur dengan:

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \frac{\sum PAD}{\sum Belanja} \times 100\%$$

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin, akan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi. Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) menjelaskan bahwa rendahnya kapasitas fiskal menyebabkan anggaran yang tersedia akan tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak menyediakan layanan publik yang berkualitas. Buruknya layanan publik ini membuat kondisi kemiskinan akan semakin buruk.

Kapasitas fiskal yang buruk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang lain. Buruknya pelayanan pemerintah mempengaruhi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, terutama pada masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan orang-orang berpenghasilan rendah sangat tergantung pada layanan pemerintah sebagai kebutuhan dasar – seperti pendidikan dan kesehatan. Kurangnya kepercayaan memiliki konsekuensi ekonomi, yaitu ketika orang memandang bahwa sistem sosial yang tidak dipercaya dan tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi insentif untuk terlibat dalam kegiatan produktif (Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector, 2003).

### Korupsi

Lembaga *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat dibedakan menjadi penggelapan, nepotisme, penyuapan, pemerasan, *influence peddling*, dan penipuan.

*Transparency International Indonesia* (TII) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan mencoba mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik korupsi di suatu daerah. IPK Indonesia melihat sejauh mana kualitas tata kelola berdasarkan pengalaman atau persepsi mereka.

Huguette Labelle, ketua TI, menyatakan bahwa korupsi membuat jutaan penduduk terperangkap kemiskinan. Hasil penelitian Paolo Maoro (1995) menunjukkan bahwa hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi adalah negatif.

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) menjelaskan dampak korupsi terhadap kemiskinan melalui dua model, yaitu model ekonomi dan model pemerintahan. Model ekonomi menjelaskan bahwa korupsi menyebabkan investasi berkurang, mendistorsi pasar, menghalangi kompetisi, menciptakan inefisien dengan meningkatkan biaya untuk berbisnis, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Hal ini menyebabkan kondisi kemiskinan semakin buruk. Sementara itu, model pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi mengikis kapasitas lembaga pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, mengalihkan investasi publik dari kebutuhan publik utama dalam proyek-proyek modal (dimana suap dapat terjadi), menurunkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan, dan meningkatkan tekanan anggaran pada pemerintah. Buruknya kapasitas pemerintahan ini menyebabkan kemiskinan semakin meningkat.

Korupsi tidak selalu menyebabkan kemiskinan, karena korupsi bisa “tidur bersama” dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Leff dan Huntington (dalam Tika Widiastuti, 2008) menyatakan bahwa tidak semua korupsi mempunyai dampak buruk terhadap perekonomian. Korupsi yang bersifat “*speed money*” mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. adanya suap membuat pengusaha terhindar dari penundaan birokrasi, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai rencana. Sementara Robert Klitgaard (dalam Tika Widiastuti, 2008) menjelaskan adanya “dana taktis” pimpinan birokrat terkadang dibutuhkan demi mempercepat dan melancarkan proses kegiatan. Pote Sarasin, Ketua Dewan Pembangun Thailan tahun 1980-an (dalam Korupsi yang Memiskinkan, Maria Hartiningsih (Ed), 2011), menyatakan apabila korupsi dibatasi di bawah 20%, maka pembangunan masih mungkin berjalan.

## METODE PENELITIAN

### Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisa pengaruh IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 dan 2010. Penelitian ini mengambil sampel Kabupaten/Kota yang ada di masing-masing Provinsi di Indonesia. Namun terdapat Kabupaten/Kota yang data-datanya tidak lengkap ataupun tidak dipublikasikan secara nasional. Dengan keterbatasan tersebut, jumlah Kabupaten/Kota yang diteliti adalah 38 Kabupaten/Kota, yaitu Banda Aceh, Sibolga, Medan, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Cirebon, Semarang, Surakarta, Tegal, Yogyakarta, Jember, Kediri, Malang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Kendari, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, Jayapura, Ternate, Pangkal Pinang, Gorontalo, Batam, Tanjung Pinang, Sorong, dan Mamuju.

Penelitian ini juga dilakukan untuk membandingkan perbedaan perilaku pengaruh IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan yang terjadi pada tahun 2008 dan 2010. Adanya keterbatasan data juga yang mendasari pemilihan tahun 2008 dan 2010 sebagai sampel penelitian.

### Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan dari 38 kabupaten/kota tahun 2008 dan 2010. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi dari 38 kabupaten/kota tahun 2008 dan 2010.

Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan (P) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan suatu kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
2. IPM (W) dinyatakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang mengukur usia harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak suatu kabupaten/kota yang diambil dari BPS.
3. Kapasitas fiskal (E) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kapasitas fiskal dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$E_i = \frac{\sum PAD_i}{\sum Belanja_i} \times 100\%$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Belanja = Belanja Daerah

i = Kabupaten/Kota

4. Korupsi (K) adalah skala korupsi atau tingkat korupsi kabupaten/kota yang diukur dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) setiap dua tahun sekali. IPK Indonesia merupakan skala numerik yang mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di 50 Kabupaten/Kota di Indonesia yang disusun berdasarkan jawaban dari pelaku bisnis. Hasil pengukuran ini disajikan dalam parameter kuantitatif yang berwujud angka untuk membandingkan antara skala korupsi suatu daerah dengan daerah lain,

atau tingkat korupsi suatu daerah tahun 2008 dan 2010. Rentang indeksinya antara 0 (nol) sampai dengan 10, dimana 0 (nol) berarti sangat korup dan 10 berarti sangat bersih.

### **Metode Analisis**

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, dimana kedua tujuan tersebut dianalisis dengan metode yang berbeda.

### **Matriks Korelasi**

Untuk mengetahui kekuatan hubungan yang terdapat antara IPM, kapasitas fiskal, korupsi, dan kemiskinan digunakan matriks korelasi. Hasil perhitungan korelasi dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a) Korelasi positif kuat, artinya setiap kenaikan skor pada variabel yang satu akan diikuti dengan kenaikan skor variabel lainnya,
- b) Korelasi negatif kuat, artinya setiap kenaikan skor pada variabel yang satu akan diikuti dengan penurunan skor variabel lainnya. Sebaliknya, apabila skor suatu variabel turun, maka skor variabel lainnya akan naik,
- c) Tidak ada korelasi, artinya bahwa naik atau turunnya skor suatu variabel tidak mempunyai kaitan dengan naik atau turunnya variabel lainnya.

Besarnya koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Kriteria kekuatan hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) 0 : tidak ada korelasi antara dua variabel
- b) >0-0,25 : korelasi sangat lemah
- c) >0,25-0,5 : korelasi cukup kuat
- d) >0,5-0,75 : korelasi kuat
- e) >0,75-0,99 : korelasi sangat kuat
- f) 1 : korelasi sempurna

### **Tujuan Pertama**

Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan yang dianalisis dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan program Eviews 6. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P_i = \alpha_0 + \alpha_1 W_i + \alpha_2 E_i + \alpha_3 K_i + u_i$$

Dimana:

- P = tingkat kemiskinan  
K = korupsi  
W = IPM  
E = kapasitas fiskal  
u<sub>1</sub> = komponen eror  
 $\alpha_0$  = intersep  
 $\alpha_{1,2,3}$  = koefisien regresi variabel independen  
i = kabupaten/kota  
t = tahun 2008 dan 2010

### **Tujuan Kedua**

Tujuan kedua dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan perilaku IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan antara tahun 2008 dan 2010 yang dapat diketahui dengan menganalisis koefisien hasil regresi. Uji kausalitas granger dilakukan untuk menganalisis lebih dalam hubungan kausalitas antara masing-masing variabel.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Objek Penelitian**

Tabel 1. Data Kemiskinan, Korupsi, Kapasitas Fiskal, dan IPM di 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010

No	Kota/Kabupaten	Kemiskinan		Korupsi		Kapasitas Fiskal		IPM	
		2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
1	Banda Aceh	9,56	9,19	5,87	4,61	9,46	10,26	75,75	77,45
2	Sibolga	17,67	13,9	4,25	5,15	3,84	5,30	74,22	75,08
3	Medan	10,43	10,05	3,84	4,17	26,49	20,65	75,85	77,36
4	Padang Sidempuan	11,61	10,53	3,66	4,58	2,60	4,56	74,08	75,21
5	PmtSiantar	13,36	11,72	3,96	5,02	5,22	4,97	76,34	77,51
6	Pekan Baru	3,63	4,20	3,55	3,61	13,78	15,47	76,40	78,27
7	Jambi	11,63	9,90	5,57	4,13	8,86	11,00	74,50	76,07
8	Palembang	16,66	15,00	3,87	4,7	11,14	16,42	74,60	76,23
9	Bandar Lampung	15,41	14,58	4,58	4,93	8,69	8,68	75,10	75,70
10	Bandung	4,42	4,95	3,67	5,04	15,28	16,74	74,80	76,06
11	Cirebon	14,11	12,00	3,82	3,61	12,68	11,97	72,70	74,93
12	Semarang	6,00	5,12	4,58	5,00	20,22	17,50	75,00	77,11
13	Surakarta	16,13	13,96	5,35	6,00	13,54	14,34	75,80	77,86
14	Tegal	11,28	10,62	3,32	6,26	6,80	17,40	71,60	73,89
15	Yogyakarta	10,81	9,75	6,43	5,81	18,96	21,10	77,90	79,52
16	Jember	17,74	13,27	4,96	4,71	10,79	10,47	63,00	64,95
17	Kediri	11,71	9,31	4,49	5,56	14,26	12,18	74,30	76,28
18	Malang	7,22	5,90	5,00	4,15	12,13	12,02	74,80	77,20
19	Surabaya	8,23	7,07	4,26	3,97	36,11	24,75	76,36	77,28
20	Pontianak	9,29	6,62	3,81	4,52	10,13	11,72	70,60	72,96
21	Palangkaraya	4,64	5,31	6,10	5,03	4,69	6,25	76,80	78,30
22	Banjarmasin	4,77	5,04	5,11	5,20	9,51	8,84	71,70	73,84
23	Samarinda	4,67	5,21	5,03	4,85	6,29	23,22	76,12	77,05
24	Manado	6,59	6,51	3,98	5,35	11,91	16,41	76,20	78,02
25	Palu	10,1	9,98	4,50	5,10	7,96	9,60	74,6	76,4
26	Kendari	8,53	8,02	3,43	5,20	7,21	6,80	74,1	75,66
27	Denpasar	2,19	2,21	4,25	6,71	26,71	20,84	76,8	77,94
28	Mataram	16,13	14,44	5,41	5,39	7,29	8,38	70,00	72,32
29	Kupang	14,66	10,56	2,97	4,87	5,14	8,26	75,8	77,31
30	Ambon	7,92	7,67	4,32	5,29	5,25	8,64	76,4	78,56
31	Jayapura	18,67	17,31	5,01	4,33	6,10	3,24	73,8	75,76
32	Ternate	4,15	4,53	5,01	4,42	5,37	7,2	73,8	76,58
33	Pangkal Pinang	5,74	6,02	5,03	4,19	8,28	6,75	74,10	75,83
34	Gorontalo	5,23	5,49	4,83	5,69	10,62	13,86	71,9	73,08
35	Batam	7,22	12,6	4,44	4,73	19,13	14,84	77,28	77,8
36	Tanjung Pinang	14,30	12,6	4,35	4,55	7,66	8,19	73,9	74,59
37	Sorong	14,93	14,02	4,39	4,26	3,93	4,88	66,9	77,18
38	Mamuju	8,11	8,16	4,08	4,45	2,67	5,20	67,95	69,32

Pada tahun 2008 Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya terendah adalah Kota Denpasar (2,19 persen), Kota Pekanbaru (3,63 persen), dan Kota Ternate (4,15 persen). Sedangkan Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kota Jayapura (18,67 persen), Kabupaten Jember (17,74 persen), dan Kota Sibolga (17,67 persen). Pada tahun 2010 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan paling rendah adalah Kota Denpasar (2,21 persen), Kota Pekanbaru (4,20 persen), dan Kota Banjarmasin (5,04 persen). Sedangkan Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2010 adalah Kota Jayapura (17,31 persen), Kota Palembang (15,00 persen), dan Kota Surakarta (13,96 persen).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 38 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta (77,90), Kota Batam (77,28), Kota Denpasar (76,80), Kota Pekanbaru dan Kota Ambon (76,40), serta Kota Surabaya (76,36). Sedangkan Kabupaten/Kota dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Jember (63,00), Kota Sorong (66,90), Kota Mamuju (67,95), Kota Mataram (70,00), dan Kota Pontianak (70,60). Pada tahun 2010 Kabupaten/Kota yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta (79,52), Kota Ambon (78,56), Kota Palangkaraya (78,30), Kota Pekanbaru (78,27), dan Kota Denpasar (77,94). Sedangkan Kabupaten/Kota dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Jember (64,95), Kota Mamuju (69,32), Kota Mataram (72,32), Kota Pontianak (72,96), dan Kota Gorontalo (73,08).

Pada tahun 2008, Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal tertinggi adalah Kota Surabaya (36,11 persen), Kota Denpasar (26,71 persen), dan Kota Medan (26,49 persen). Sedangkan kapasitas fiskal terendah pada tahun 2008 adalah Kota Padang Sidempuan (2,60 persen), Kota Mamuju (2,67 persen), dan Kota Sibolga (3,84 persen). Pada tahun 2010 Kabupaten/Kota yang mempunyai kapasitas ekonomi tertinggi adalah Kota Surabaya (24,75 persen), Kota Samarinda (23,22 persen), dan Kota Yogyakarta (21,10 persen). Sementara kapasitas fiskal terendah adalah Kota Jayapura (3,24 persen), Kota Padang Sidempuan (4,56 persen), dan Kota Sorong (4,88 persen).

Berdasarkan hasil survei lembaga TII tiga Kabupaten/Kota terbersih dari praktik korupsi pada tahun 2008 adalah Kota Yogyakarta (6,43), Kota Palangkaraya (6,1), dan Kota Banda Aceh (5,87). Sedangkan tiga Kabupaten/Kota terkorup pada tahun 2008 adalah Kota Kendari (3,43), Kota Tegal (3,32), dan Kota Kupang (2,97). Pada tahun 2010 terjadi perubahan, beberapa Kabupaten/Kota berhasil mengurangi korupsi yang terjadi di daerahnya. Akan tetapi ada daerah yang malah semakin tinggi korupsinya. Pada tahun 2010 tiga Kabupaten/Kota terbersih adalah Kota Denpasar (6,71), Kota Tegal (6,26), dan Kota Surakarta (6,00). Sementara tiga Kabupaten/Kota terkorup pada tahun 2010 adalah Kota Surabaya (3,94), Kota Cirebon (3,61), dan Kota Pekanbaru (3,61).

### Hubungan antara IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan

Tabel 2. Matriks Korelasi antara Variabel IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan Tahun 2008 dan 2010

Variabel	Tahun	
	2008	2010
IPM	-0,334852	-0,208678
Kapasitas fiskal	-0,272539	-0,354811
Korupsi	-0,038547	-0,082010

Tabel 2 menunjukkan perhitungan matriks korelasi pada tahun 2008 dan 2010. Perhitungan matriks korelasi pada tahun 2008 dan 2010 ini menunjukkan hubungan variabel IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi dengan variabel kemiskinan adalah tidak searah. Ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai pada variabel independen akan diikuti dengan penurunan nilai variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai variabel independen turun, maka nilai variabel dependen akan naik. Pada tahun 2008, dapat dikemukakan bahwa hubungan antara IPM dan kemiskinan (-0,334852) serta kapasitas fiskal dan kemiskinan (-0,272539) adalah lemah. Sementara hubungan antara korupsi dan kemiskinan lemah sekali (-0,038547). Sama seperti yang terjadi pada tahun 2008, pada tahun 2010 terdapat hubungan yang lemah antara IPM dan kemiskinan (-0,208678) serta kapasitas fiskal dan kemiskinan (-0,354811). Hubungan antara korupsi dan kemiskinan juga masih menunjukkan hubungan yang lemah sekali (-0,082010).

Hasil dari matriks korelasi antara IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi dengan kemiskinan, terlepas apakah hubungannya signifikan atau tidak secara statistik, menunjukkan bahwa hubungan tersebut terkonfirmasi benar secara teoritis. IPM mempengaruhi kemiskinan secara negatif, artinya semakin tinggi tingkat IPM suatu daerah maka kemiskinan di daerah tersebut akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kanbur dan Squire bahwa perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dapat mengurangi kemiskinan. Kapasitas fiskal juga mempengaruhi kemiskinan secara negatif, artinya semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah maka kemiskinan di daerah tersebut akan semakin rendah. Chetwynd, dkk menjelaskan bahwa tingginya kapasitas fiskal akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas produksi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi inilah kondisi kemiskinan akan dapat diperbaiki. Begitu juga dengan korupsi, semakin korup suatu daerah maka kondisi kemiskinan daerah tersebut akan semakin buruk. Hal ini sesuai dengan penelitian Chetwynd, dkk (2003) yang menjelaskan bahwa korupsi akan menghambat investasi. Dengan rendahnya investasi, maka pertumbuhan daerah tersebut akan ikut terhambat dan tingkat ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi yang kemudian berimbas pada semakin buruknya kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

### **Hasil Analisis Tujuan Pertama Pengujian Statistik**

Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh korupsi, IPM, dan kapasitas fiskal terhadap kemiskinan yang dianalisis menggunakan metode OLS. Tabel 3 menunjukkan hasil regresi pengaruh IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan 38 Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010. Dari hasil regresi pada tahun 2008 diperoleh  $R^2$  sebesar 0,141358. Hal ini berarti tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel korupsi, IPM, dan kapasitas fiskal hanya sebesar 14,14 persen. Sedangkan sisanya sebesar 85,86 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil regresi untuk tahun 2010 diperoleh  $R^2$  sebesar 0,138930. Hal ini berarti tingkat kemiskinan hanya dapat dijelaskan oleh variabel korupsi, IPM, dan kapasitas fiskal sebesar 13,90 persen. Sedangkan sisanya sebesar 86,10 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil dari *degree of freedom for numerator* (dfn) dan hasil dari *degree of freedom for denominator* (dfd) adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} dfn = k - 1 \\ = 4 - 1 \\ = 3 \end{array} \qquad \begin{array}{l} dfd = n - k \\ = 38 - 4 \\ = 34 \end{array}$$

Hasil regresi pengaruh IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2008 dan 2010 dengan menggunakan persamaan 4.2 dan persamaan 4.3 diperoleh F-tabel sebesar 2,882604 ( $\alpha = 5$  persen) dan 2,252387 ( $\alpha = 10$  persen). Hasil regresi untuk tahun 2008 diperoleh F-statistik sebesar 1,865800 yang tidak signifikan pada  $\alpha = 5$  persen maupun  $\alpha = 10$  persen. Oleh karena itu variabel independen kurang berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Begitu juga dengan hasil regresi untuk tahun 2010 dimana diperoleh F-statistik sebesar 1,8282589 yang tidak signifikan pada  $\alpha = 5$  persen maupun  $\alpha = 10$  persen. Oleh karena itu variabel independen kurang berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Berdasarkan uji statistik t, pada tahun 2008 variabel kapasitas fiskal signifikan pada  $\alpha = 10$ , sementara IPM dan korupsi tidak signifikan baik  $\alpha = 5$  persen maupun  $\alpha = 10$  persen. Pada tahun 2010 variabel kapasitas fiskal signifikan pada  $\alpha = 5$ , sementara IPM dan korupsi tidak signifikan baik pada  $\alpha = 5$  persen maupun  $\alpha = 10$  persen.



Tabel 3. Hasil Regresi Pengaruh IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan

Variabel	Tahun							
	2008				2010			
	Coef.	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Coef.	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42,71653	18,89923	2,260226	0,0303	24,57006	17,62354	1,394162	0,1723
IPM	-0,413884	0,257200	-1,609190 <sup>2</sup>	0,1168	0,164321	0,230277	0,713579	0,4804
Kapasitas fiskal	-0,115854	0,108467	-1,068106	0,2930	0,211158	0,111687	1,890629 <sup>1</sup>	0,0672 <sup>2</sup>
Korupsi	-0,150477	0,939228	-0,160214	0,8737	0,064422	0,891607	0,072253	0,9428
R-squared	0,141358				0,138930			
Adjusted R-square	0,065595				0,062953			
S.E. of regression	4,479490				3,635306			
F-statistic	1,865800				1,828589			
Prob. (F-statistic)	0,153982				0,160541			

**Pengujian Asumsi Klasik**

a) Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari perbandingan antara nilai R<sup>2</sup> regresi parsial (*auxiliary regression*) dengan nilai R<sup>2</sup> regresi utama. Apabila nilai R<sup>2</sup> regresi parsial lebih besar dibandingkan dengan nilai R<sup>2</sup> regresi utama, maka kesimpulannya adalah dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas. Tabel 4 menunjukkan bahwa model persamaan tidak mengandung multikolinearitas, karena tidak ada nilai R<sup>2</sup> regresi parsial yang lebih besar dibandingkan dengan nilai R<sup>2</sup> regresi utama.

Tabel 4. Hasil Auxiliary Regression Model

Regresi	R <sup>2</sup>	
	2008	2010
P = f(E, K, W) (regresi utama)	0,141358	0,138930
E = f(K, W) (regresi parsial)	0,115598	0,111857
K = f(E, W) (regresi parsial)	0,003762	0,039240
W = f(P, E, K) (regresi parsial)	0,118098	0,078881

b) Uji Heteroskedastisitas

Fenomena heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji white. Uji heteroskedastis dilakukan dengan membandingkan nilai Obs\*R-squared hasil uji white dengan nilai  $\chi^2$  tabel. Apabila nilai Obs\*R-squared lebih besar dibandingkan dengan nilai  $\chi^2$ , maka model estimasi regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Nilai Obs\*R-squared dari hasil regresi uji white pada tahun 2008 adalah 5,502807 dan pada tahun 2010 adalah 3,277784, dengan  $\chi^2$  tabel sebesar 43,7729 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan pada tahun 2008 dan 2010 tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White)

Tahun	F-statistik	Obs*R-squared
2008	0,526810	5,502807
2010	0,293689	3,277784

c) Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji Jarque – Berra (JB Test).

Tabel 6. Hasil Uji Jarque – Berra

Tahun	Jarque – Berra
2008	2,153938
2010	1,974299

Nilai Jarque-Berra pada tahun 2008 adalah sebesar 2,153938 dan pada tahun 2010 sebesar 1,974299, sedangkan nilai  $\chi^2$  tabel sebesar 43,7729. Apabila nilai  $\chi^2$  tabel dibandingkan dengan nilai Jarque – Berra, baik pada tahun 2008 maupun tahun 2010, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas *error term* regresi tersebut terdistribusi secara normal karena nilai Jarque – Berra lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\chi^2$  tabel.

d) Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi.

Tabel 4.10 Hasil Uji Breusch-Godfrey

Tahun	F-statistik	Obs*R-Squared
2008	0,253188	0,591954
2010	0,113098	0,266723

Hasil uji Breusch-Godfrey menunjukkan Obs\*R-squared pada tahun 2008 sebesar 0,591954 dan pada tahun 2010 sebesar 0,266723, sedangkan hasil  $\chi^2$  tabel adalah sebesar 43,7729. Nilai Obs\*R-squared uji Breusch-Godfrey tahun 2008 dan 2010 lebih kecil dibandingkan dengan  $\chi^2$  tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi.

Hasil Analisis Tujuan Kedua

Tabel 6. Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis	Tahun			
	2008		2010	
	F-statistic	Prob.	F-statistic	Prob.
W does not Granger Cause P	1,25723	0,2700	0,58972	0,4478
P does not Granger Cause W	0,23666	0,6298	0,32489	0,5724
E does not Granger Cause P	3,59281	0,0666	4,56045	0,0400
P does not Granger Cause E	0,08077	0,7780	0,23562	0,6305
K does not Granger Cause P	0,78472	0,3819	2,17336	0,1496
P does not Granger Cause K	5,38253	0,0265	0,00123	0,9722
W does not Granger Cause E	0,00961	0,9225	1,07340	0,3075
E does not Granger Cause W	2,95715	0,0946	1,00684	0,3227
W does not Granger Cause K	0,06892	0,7945	1,25318	0,2708
K does not Granger Cause W	6,4095	0,0161	0,15068	0,7003
K does not Granger Cause E	0,24562	0,6234	0,52108	0,4753
E does not Granger Cause K	0,01465	0,9044	0,06757	0,7965

Hasil uji kausalitas granger pada Tabel 6 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan hubungan kausalitas antara variabel yang satu dengan variabel lainnya pada tahun 2008 dan 2010 dengan  $\alpha = 10$  persen. Pada tahun 2008 terlihat bahwa IPM dan kemiskinan tidak memiliki hubungan kausalitas, yang artinya IPM tidak mempengaruhi kemiskinan dan kemiskinan juga tidak mempengaruhi IPM. Kapasitas fiskal dan kemiskinan mempunyai hubungan searah, yaitu kapasitas fiskal mempengaruhi kemiskinan tetapi kemiskinan tidak mempengaruhi kapasitas fiskal. Korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan searah, yaitu kemiskinan mempengaruhi korupsi tetapi

korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan. IPM dan kapasitas fiskal mempunyai hubungan searah, yaitu kapasitas fiskal mempengaruhi IPM tetapi IPM tidak mempengaruhi kapasitas fiskal. IPM dan korupsi juga mempunyai hubungan searah, yaitu korupsi dapat mempengaruhi IPM tetapi IPM tidak mempengaruhi korupsi. Korupsi dan kapasitas fiskal tidak mempunyai hubungan kausalitas, artinya korupsi tidak mempengaruhi kapasitas fiskal dan kapasitas fiskal juga tidak mempengaruhi korupsi.

Pada tahun 2010 terjadi perubahan pola hubungan kausalitas antar variabel. Sama seperti pada tahun 2008, IPM dan kemiskinan serta korupsi dan kapasitas fiskal tidak mempunyai hubungan kausalitas, sedangkan kapasitas fiskal dan kemiskinan mempunyai hubungan searah, yaitu kapasitas fiskal mempengaruhi kemiskinan tetapi kemiskinan tidak mempengaruhi kapasitas fiskal. Korupsi dan kemiskinan tidak mempunyai hubungan kausalitas, artinya korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan dan kemiskinan juga tidak mempengaruhi korupsi. IPM dan kapasitas fiskal tidak mempunyai hubungan kausalitas, artinya IPM tidak mempengaruhi kapasitas fiskal dan kapasitas fiskal juga tidak mempengaruhi IPM. IPM dan korupsi juga tidak mempunyai hubungan kausalitas, artinya IPM tidak mempengaruhi korupsi dan korupsi juga tidak mempengaruhi IPM.

## **Pembahasan**

### **IPM (W)**

Hasil matriks korelasi dan regresi menunjukkan bahwa IPM dan kemiskinan mempunyai hubungan negatif. Artinya, semakin tinggi IPM suatu kabupaten/kota, maka tingkat kemiskinan kabupaten/kota tersebut akan semakin rendah. Hal ini membuktikan bahwa hasil matriks korelasi dan regresi terkonfirmasi sesuai dengan teori dari Ravi Kanbur dan Lyn Squire.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dan 2010 IPM tidak signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya kemiskinan. IPM tidak signifikan pada  $\alpha = 5$  persen dan  $\alpha = 10$  persen, kemungkinan dikarenakan adanya keterbatasan sample atau IPM kurang mencerminkan indikator kemiskinan. Walaupun tidak signifikan, tetapi hasil regresi menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara IPM dan kemiskinan. Artinya semakin tinggi IPM, maka kemiskinan akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian ini.

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. Namun pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Demikian pula, perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan yang menyebabkan peningkatan IPM tidak selalu mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya (Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 1999).

### **Kapasitas Fiskal (E)**

Hasil matriks korelasi dan regresi menunjukkan bahwa kapasitas fiskal mempunyai hubungan negatif. Artinya semakin tinggi kapasitas fiskal suatu kabupaten/kota, maka semakin rendah kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hasil matriks korelasi dan regresi terkonfirmasi sesuai dengan teori Ravi Kanbur dan Lyn Squire serta Eric Chetwynd, dkk.

Pada tahun 2008, kapasitas fiskal tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kemiskinan. Akan tetapi pada tahun 2010, kapasitas fiskal menunjukkan hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2010 pengelolaan kapasitas fiskal sudah lebih baik dibandingkan tahun 2008.

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) menjelaskan bahwa buruknya pengaturan kapasitas fiskal oleh pemerintah akan merusak kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap pemerintah dan lembaga lainnya. Hal ini dikarenakan orang-orang yang berpenghasilan rendah sangat bergantung pada layanan pemerintah sebagai kebutuhan dasar – seperti pendidikan dan kesehatan. Kurangnya kepercayaan masyarakat mengakibatkan masyarakat enggan untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Kapasitas fiskal merupakan variabel yang paling mempengaruhi. Kapasitas fiskal yang bersumber dari PAD akan dapat mengurangi kemiskinan apabila pemerintah bisa menaikkan PAD, dengan asumsi PAD tersebut dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan PAD dapat direalisasikan dengan cara peningkatan aktivitas ekonomi.

### **Korupsi (K)**

Hasil matriks korelasi dan regresi menunjukkan bahwa korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan negatif. Artinya, semakin korup suatu kabupaten/kota, maka tingkat kemiskinan kabupaten/kota tersebut akan semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa hasil matriks korelasi dan regresi terkonfirmasi sesuai dengan teori dari Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pada tahun 2008 dan 2010 korupsi tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kemiskinan. Variabel korupsi tidak signifikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat variabel perantara. Variabel korupsi mempengaruhi variabel kemiskinan tidak secara langsung. Berdasarkan teori dari Chetwynd, dkk, korupsi akan mempengaruhi kemiskinan melalui investasi, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Keterbatasan sampling. Penulis mengambil sampling sebanyak 38 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 dan 2010, karena adanya keterbatasan data. Hal ini memungkinkan hasil analisis kurang representatif.
3. Persoalan pengukuran. Korupsi diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dimana IPK kurang mencerminkan indikator kemiskinan. IPK mengukur persepsi pengusaha terhadap korupsi, sedangkan kemiskinan diukur berdasarkan pengeluaran per kapita.

Hubungan antara korupsi dengan kemiskinan memang tidak dapat dikuantifikasi dan langsung. Korupsi tidak selalu menyebabkan kemiskinan, karena korupsi bisa “tidur bersama” dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Korupsi berpengaruh tidak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan melalui transmisi pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh langsung jika korupsi terjadi pada program-program pengentasan kemiskinan.

### **Hasil Kausalitas Granger**

Pada tahun 2008 terlihat bahwa IPM dan kemiskinan tidak memiliki hubungan kausalitas. Ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) yang menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan, yang merupakan komponen dari IPM, dapat mempengaruhi kemiskinan.

Kapasitas fiskal dan kemiskinan mempunyai hubungan searah, yaitu kapasitas fiskal mempengaruhi kemiskinan tetapi kemiskinan tidak mempengaruhi kapasitas fiskal. Ini sesuai dengan penelitian dari Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) serta Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003). Ravi Kanbur dan Lyn Squire menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin, akan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi. Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector menunjukkan bahwa kemampuan mengatur kapasitas fiskal yang buruk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang lain. Buruknya pelayanan pemerintah mempengaruhi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, terutama pada masyarakat miskin. Kurangnya kepercayaan memiliki konsekuensi ekonomi, yaitu ketika orang memandang bahwa sistem sosial yang tidak dipercaya dan tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi insentif untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan searah, yaitu kemiskinan mempengaruhi korupsi tetapi korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan. Ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) yang menjelaskan bahwa korupsi mempengaruhi kemiskinan melalui dua model, yaitu model ekonomi dan model pemerintahan. Orang melakukan korupsi kemungkinan karena semakin banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupi, sementara pendapatan yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, sehingga orang tersebut melakukan korupsi.

IPM dan kapasitas fiskal mempunyai hubungan searah, yaitu kapasitas fiskal mempengaruhi IPM tetapi IPM tidak mempengaruhi kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal bersumber dari PAD yang kemudian diasumsikan dibelanjakan untuk memenuhi kepentingan publik, yang termasuk di dalamnya adalah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan indikator dari IPM.

IPM dan korupsi juga mempunyai hubungan searah, yaitu korupsi dapat mempengaruhi IPM tetapi IPM tidak mempengaruhi korupsi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tika

Widiastuti (2008) yang menjelaskan bahwa korupsi berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan IPM. Terjadinya inefisiensi pada sisi pengeluaran pemerintah kurang memberikan pengaruh positif langsung terhadap kesejahteraan. Hal ini dikarenakan adanya korupsi pada alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tingkat korupsinya rendah.

Korupsi dan kapasitas fiskal tidak mempunyai hubungan kausalitas, artinya korupsi tidak mempengaruhi kapasitas fiskal dan kapasitas fiskal juga tidak mempengaruhi korupsi.

Hasil kausalitas granger menunjukkan perubahan pola antara tahun 2008 dan 2010. Pada tahun 2010 hanya terdapat satu hubungan kausalitas, yaitu kapasitas fiskal mempengaruhi kemiskinan. Kemungkinan yang terjadi pada tahun 2010 adalah penanggulangan kemiskinan berjalan bersama dengan terjadinya korupsi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. IPM tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Akan tetapi IPM dan kemiskinan mempunyai hubungan negatif. Artinya, semakin tinggi IPM suatu kabupaten/kota, maka kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota tersebut semakin rendah.
2. Kapasitas fiskal dapat mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Semakin tinggi kapasitas fiskal suatu kabupaten/kota, maka kemiskinan di kabupaten/kota tersebut akan semakin rendah.
3. Korupsi tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Akan tetapi korupsi dan kemiskinan mempunyai hubungan yang negatif. Artinya, semakin korup suatu kabupaten/kota, maka kemiskinan di kabupaten/kota tersebut akan semakin tinggi kemiskinannya.
4. Terjadi perbedaan pola perilaku antara IPM, kapasitas fiskal, korupsi, dan kemiskinan pada tahun 2008 dan 2010.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. IPM berpotensi mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga ke depannya dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan IPM dengan memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan yang tidak terpusat di suatu daerah melainkan merata ke seluruh daerah di Indonesia.
2. Semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah maka kemiskinan di daerah tersebut akan semakin rendah. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah dapat meningkatkan PAD sebagai sumber belanja, dengan asumsi PAD tersebut dibelanjakan untuk kepentingan publik. PAD berasal dari pajak dan retribusi, sehingga untuk meningkatkan PAD pemerintah harus meningkatkan aktivitas ekonomi. Meningkatnya aktivitas ekonomi ini akan mendorong peningkatan pendapatan, sehingga sumber-sumber pajak dapat meningkat dan PAD juga akan meningkat.
3. Semakin korup suatu daerah maka tingkat kemiskinan daerah tersebut semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk menekan tingkat kemiskinan maka korupsi yang terjadi harus diberantas terlebih dahulu. Proses penyeleksian pejabat harus dilakukan dengan cara yang benar, untuk menghindari adanya pejabat-pejabat korup. Selain itu hukum untuk para koruptor harus tegas dan berat, sehingga memberi efek jera bagi koruptor dan orang yang hendak melakukan korupsi akan berfikir ulang untuk melakukan korupsi.

## REFERENSI

- Ajija, Shochrul R., Dyah W. Sari, Rahmat H. Setianto, dan Martha R. Primanti. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. *Data dan Informasi Indeks Pembangunan Manusia Berbagai Tahun Terbitan*. Indonesia.
- \_\_\_\_\_. *Data dan Informasi Kemiskinan Indonesia Berbagai Tahun Terbitan*. Indonesia.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Indonesia Berbagai Tahun Terbitan*. Indonesia.
- \_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berbagai Tahun Terbitan*. Indonesia.



- Chetwynd, Eric, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector. 2003. *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*. Washington, Dc USA: Management System International.
- Gujarati, Damodar and Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartiningsih, Maria (ed). 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kanbur, Ravi and Lyn Squire. 1999. *The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring The Interactions*. <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers.htm> . Diakses tanggal 4 Oktober 2012.
- Transparency International Indonesia. 2008. *Indeks Persepsi Korupsi*. <http://www.ipkindonesia.org> . Diakses tanggal 2 Oktober 2011.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Indeks Persepsi Korupsi*. <http://www.ipkindonesia.org> . Diakses tanggal 2 Oktober 2011.
- Widiastuti, Tika. 2008. *Dampak Korupsi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Beberapa Negara Muslim*. Disertasi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.